

**LAPORAN MBKM *By Design* FKM UNAIR  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB)  
KOTA SURABAYA**

**IMPLEMENTASI SEKOLAH SIAGA  
KEPENDUDUKAN DI SMP NEGERI 37 SURABAYA**



**SABRINA SALSA ANGGITA PANJAITAN  
102011133189**

**Divisi Biostatistika dan Kependudukan**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT  
SURABAYA**

**2023**

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG MBKM  
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN  
ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA  
BERENCANA KOTA SURABAYA**

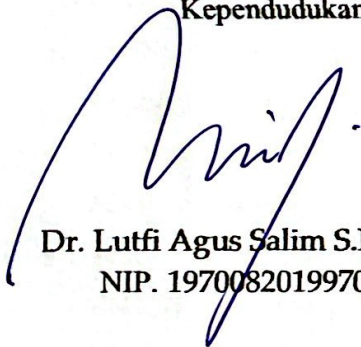
Disusun Oleh:

Sabrina Salsa Anggita Panjaitan

NIM. 102011133189

Telah disahkan dan diterima dengan baik oleh:

Dosen Pembimbing Magang MBKM  
Divisi Biostatistika dan  
Kependudukan



Dr. Lutfi Agus Salim S.KM., M.Si.  
NIP. 197008201997021001

Pembimbing Lapangan Magang  
MBKM DP3APPKB



Rio Darmawan Jaya, S.H.

Koordinator Program Studi Kesehatan  
Masyarakat Program Pendidikan  
Sarjana



Dr. Muji Sulistyowati, S.KM., M.Kes.  
NIP. 197311151999032002

Ketua Divisi  
Biostatistika dan Kependudukan



Dr. Soenarnatalina Melaniani, Ir.,  
M.Kes.  
NIP. 196012251990032001

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya Laporan MBKM *by Design* FKM UNAIR di DP3APPKB dengan judul “Implementasi Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 37 Surabaya”. Dalam Penyusunan dan penulisan laporan magang ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Selain itu, dengan senang hati saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Santi Martini dr., M.Kes., selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.
2. Dr. Muji Sulistyowati, S.KM., M.Kes., selaku koordinator Program Studi Fakultas Kesehatan Masyarakat.
3. Dr. Rr. Soenarnatalina M., Ir., M.Kes selaku Kepala Divisi Biostatistika dan Kependudukan di Fakultas Kesehatan Masyarakat.
4. Dr. Lutfi Agus Salim S.KM., M.Si selaku dosen pembimbing MBKM *by Design* FKM UNAIR.
5. Bapak Rio DJ, SH selaku pembimbing lapangan MBKM *by Design* FKM UNAIR di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya.
6. Keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi setiap saat.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan pahala atas segala amal yang telah diberikan dan semoga laporan MBKM *by Design* FKM UNAIR ini berguna dan bermanfaat baik diri sendiri maupun pihak lain.

Surabaya, 05 Desember 2023

Sabrina Salsa Anggita Panjaitan

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Manfaat.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>5</b>
2.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB).....	5
2.2 Sejarah Berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya.	5
2.3 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya.	6
2.4 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya.	6
2.5 Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya.	7
2.6 Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).....	10
2.7 Pojok Kependudukan.....	11
2.8 Pokok-pokok Pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).....	12
2.9 Indikator SSK Dasar dan SSK Paripurna.....	13

2.10 Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).....	14
2.11 SMP Negeri 37 Surabaya.....	15
<b>BAB III METODE PELAKSANAAN.....</b>	<b>17</b>
3.1 Lokasi MBKM <i>by Design</i> FKM UNAIR.....	17
3.2 Waktu Pelaksanaan MBKM <i>by Design</i> FKM UNAIR.....	17
3.3 Metode Pelaksanaan MBKM <i>by Design</i> FKM UNAIR.....	18
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	18
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>20</b>
4.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.....	20
4.2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Surabaya.....	21
4.3 Pembelajaran Pencapaian Learning Outcome Mata Kuliah.....	24
4.4 Implementasi Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 37 Surabaya.....	28
4.5 Indikator Keberhasilan SSK Paripurna yang Tercapai di SMP Negeri 37 Surabaya.....	30
4.6 Kendala Pelaksanaan MBKM <i>by Design</i> FKM UNAIR.....	31
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>33</b>
5.1 Kesimpulan.....	33
5.2 Saran.....	33
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>35</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>36</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Indikator SSK Dasar dan SSK Paripurna.....	13
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan MBKM <i>by Design</i> FKM UNAIR.....	17
Tabel 4.1 Indikator Keberhasilan SSK Paripurna SMP Negeri 37 Surabaya.....	30

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Contoh RPP Kelas VII Mata Pelajaran IPS..... 15

Gambar 4.1 Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan  
Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)  
Kota Surabaya.....24

**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	<i>Logbook MBKM by Design</i> FKM UNAIR.....	36
Lampiran II	SK SSK Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Surabaya.....	40
Lampiran III	Dokumentasi Magang.....	44
Lampiran IV	Sertifikat MBKM by Design FKM UNAIR Tahun 2023.....	45



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kemendikbud telah melakukan berbagai langkah strategis guna meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Upaya ini bertujuan untuk memberikan kesempatan lebih luas kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan minatnya, serta meningkatkan kualitas lulusan yang siap bersaing di dunia kerja.

Salah satu komponen utama dari MBKM adalah pemberian kredit semester kepada mahasiswa yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, magang, riset, dan pengabdian masyarakat. Selain itu, program ini juga mendorong perguruan tinggi untuk menyelenggarakan mata kuliah pilihan lintas disiplin ilmu agar mahasiswa dapat menggali pengetahuan lebih mendalam di luar bidang studinya. Program yang ditawarkan MBKM terdiri dari 8 macam, yaitu program pelatihan atau magang kerja di perusahaan yang membuka lowongan, program Kampus Mengajar di sekolah terpencil dengan proses seleksi terlebih dahulu, program pertukaran mahasiswa di luar negeri atau dalam negeri menyesuaikan passion tiap individu, kegiatan kewirausahaan melihat *Global Entrepreneurship Index* (GEI), proyek individu yang bertujuan untuk menciptakan karya inovatif mahasiswa dan nantinya dapat diikutsertakan dalam perlombaan tingkat nasional maupun internasional, program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT), riset atau penelitian yang bertujuan untuk mengasah cara berpikir mahasiswa, dan proyek kemanusiaan yang bersifat *voluntary* dalam jangka waktu pendek yang bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda yang menjunjung

tinggi nilai kemanusiaan ketika dihadapkan dengan kejadian bencana alam. Melalui MBKM, pemerintah berharap dapat menciptakan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademis yang tinggi tetapi juga keterampilan *soft skills* yang diperlukan di era globalisasi ini. Dengan demikian, MBKM menjadi landasan penting dalam mencetak generasi muda yang siap menghadapi tantangan dan berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa.

Peran industri dan pendidikan saat ini berpengaruh besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan bangsa. Industri menjadi penunjang kebutuhan pembangunan dan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya kesinambungan dan kerja sama antara industri dengan institusi pendidikan agar dapat menciptakan lulusan yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Dengan memberikan mahasiswa kesempatan untuk mengenal dunia industri secara langsung, baik melalui pengalaman lapangan maupun proyek bersama, mereka dapat mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dan memahami dinamika pekerjaan di lapangan.

Peran industri juga dapat membantu institusi pendidikan dalam merancang kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan mendengarkan masukan dari industri, perguruan tinggi dapat memastikan bahwa lulusan mereka memiliki kompetensi yang diinginkan oleh dunia industri, sehingga lebih mudah untuk menyesuaikan diri dan berkontribusi secara positif setelah lulus. Selain itu, institusi pendidikan juga dapat berperan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif dan berkualitas tinggi yang dapat membantu industri meningkatkan daya saingnya. Dengan demikian, kolaborasi antar industri dan pendidikan menjadi kunci untuk memajukan pembangunan ekonomi dan mencapai tujuan pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Peranan pendidikan kependudukan untuk mengatasi permasalahan

kependudukan menjadi sangat penting dan strategis. BKKBN sendiri telah menggagas Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), yaitu sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran dalam kerangka pengayaan materi pembelajaran agar guru dan peserta didik dapat memahami isu kependudukan secara lebih luas dan guru mampu mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam pembelajaran sesuai kurikulum. Dalam program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), materi kependudukan diintegrasikan dengan mata pelajaran sesuai dengan pokok bahasan, sehingga tidak menambah jam pelajaran, tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar, namun justru memperdalam materi yang dibahas. Pada awal tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan sosialisasi tentang Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) kepada sekitar 100 SMP dan MTS di Kota Surabaya. Beberapa sekolah SMP dan MTS menyatakan bersedia untuk membentuk dan mengikuti program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) menjadi wadah dan wahana untuk pembelajaran pembangunan berwawasan kependudukan.

## **1.2 Tujuan**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Kegiatan MBKM *by Design* FKM UNAIR dilaksanakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan implementasi pendidikan kependudukan melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di Kota Surabaya.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

1. Menganalisis permasalahan kependudukan di lingkungan

sekolah.

2. Menumbuhkan pola hidup berwawasan kependudukan.

### **1.3 Manfaat**

#### **1.3.1 Manfaat Bagi Mahasiswa**

1. Mendapat wawasan dan pengalaman secara langsung dari lapangan terkait isu-isu atau permasalahan kependudukan.
2. Perubahan perilaku atau sikap ke arah yang lebih positif seiring dengan meningkatnya wawasan kependudukan mahasiswa.
3. Mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan positif guna dapat mencari solusi terkait permasalahan kependudukan.

#### **1.3.2 Manfaat Bagi Perguruan Tinggi**

Terjalannya kerja sama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya.

#### **1.3.3 Manfaat Bagi Perusahaan (Instansi/Dinas)**

1. Membantu memberikan masukan sekaligus bahan pertimbangan untuk perencanaan, pengembangan, dan evaluasi program-program Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya, baik dari segi teknis maupun administratif.
2. Bagi Pemerintah Kota Surabaya, kegiatan MBKM ini dapat membantu dalam meningkatkan pengetahuan dan kepedulian siswa di Kota Surabaya terhadap isu-isu kependudukan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **2.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB)**

DP3APPKB adalah dinas yang berada di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta berada di bawah naungan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). DP3APPKB merupakan singkatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya berlokasi di Jalan Kedungsari No. 18, Wonorejo, Tegalsari, Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60263.

#### **2.2 Sejarah Berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya**

- Berdasarkan Surat gubernur Jatim Nomor: 61/7990/041/2003 tanggal 13 Oktober 2003, perihal Penataan Kelembagaan dan Penyerahan personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) BKKBN Kabupaten/Kota.
- Surat BKKBN Provinsi Jawa Timur Nomor: 2500/01.001/1.1/X.03 tanggal 20 Oktober 2003 perihal Penataan Kelembagaan dan Penyerahan P3D BKKBN Kabupaten/Kota.
- Serah terima Satuan Kerja, Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) BKKBN Kota Surabaya kepada Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 19 Desember 2003 bertempat di Graha Sawunggaling.

- Keputusan Walikota Surabaya Nomor 05 tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang Organisasi Badan Koordinasi Keluarga Berencana.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 tahun 2005 tanggal 14 November 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 76 tahun 2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat & Keluarga Berencana Kota Surabaya.
- Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

### **2.3 Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya**

Visi dari DP3APPKB Kota Surabaya adalah terwujudnya keluarga yang berkualitas dan berdaya dengan dukungan lembaga berbasis masyarakat. Sedangkan, misi dari DP3APPKB Kota Surabaya yaitu:

- Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- Meningkatkan kualitas pelayanan KB serta pembinaan ketahanan keluarga.
- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pemberdayaan masyarakat.

### **2.4 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya**

Tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai lingkup tugasnya.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2.5 Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya**

Menurut Peraturan Walikota Nomor 77 tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana terdiri atas:

1. Sekretariat: Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan

fungsinya. Sekretariat membawahi sub bagian:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan: Bidang pemberdayaan perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang pemberdayaan perempuan terdiri atas:
- Seksi Pembinaan Pemberdayaan Perempuan
  - Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peran Aktif Perempuan
3. Bidang Kesejahteraan Keluarga: Bidang kesejahteraan keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesejahteraan keluarga yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang kesejahteraan keluarga terdiri atas:
- Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
  - Seksi Ketahanan Keluarga
4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja



sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdiri atas:

- Seksi Keluarga Berencana
- Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)

5. Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak: Bidang pengarusutamaan hak anak, perlindungan perempuan dan anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengarusutamaan hak anak, perlindungan perempuan dan anak yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang pengarusutamaan hak anak, perlindungan perempuan dan anak terdiri atas:

- Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak
- Seksi Pengarusutamaan Hak Anak

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD): Pada dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan dan susunan organisasi UPTD diatur dalam Peraturan Walikota.
7. Kelompok Jabatan Fungsional: Walikota berwenang untuk menetapkan kelompok jabatan fungsional pada dinas. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional

ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2.6 Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)

Sekolah siaga kependudukan (SSK) merupakan sekolah yang mengintegrasikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran atau muatan lokal khusus kependudukan di mana di dalamnya terdapat pojok kependudukan (*population corner*) sebagai salah satu sumber belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan Generasi Berencana (GenRe). Sekolah siaga kependudukan (SSK) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, terutama pelajar, terkait isu-isu kependudukan dan pembangunan keluarga. Program ini melibatkan sekolah-sekolah dalam upaya untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan kepada siswa mengenai aspek-aspek kependudukan, termasuk masalah-masalah seperti pertumbuhan penduduk, perencanaan keluarga, kesehatan reproduksi, dan isu-isu lain yang berkaitan dengan kependudukan. Program ini dapat diimplementasikan melalui berbagai metode, seperti penyelenggaraan pelatihan khusus, penyelenggaraan acara atau kegiatan di sekolah, dan integrasi materi kependudukan dalam kurikulum pelajaran. Tujuan umum dari program sekolah siaga kependudukan (SSK) meliputi:

1. Peningkatan kesadaran: Meningkatkan pemahaman siswa dan masyarakat mengenai peran kependudukan dalam pembangunan dan dampaknya terhadap berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan.
2. Pendidikan kesehatan reproduksi: Memberikan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan pentingnya kebijakan kependudukan yang seimbang.
3. Pemberdayaan perempuan: Memahami peran perempuan dalam konteks kependudukan dan mendorong kesetaraan gender.

4. Pembentukan sikap positif: Mengembangkan sikap positif terhadap isu-isu kependudukan dan pembangunan, sehingga siswa dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
5. Penyediaan informasi: Menyediakan informasi yang akurat dan terkini mengenai tren kependudukan, potensi masalah, dan solusi yang mungkin.

## 2.7 Pojok Kependudukan

Pojok kependudukan adalah salah satu sumber belajar dan informasi bagi peserta didik yang berisi materi-materi yang berkaitan dengan kependudukan yang ditujukan dalam upaya pembentukan Generasi Berencana (GenRe). Pojok kependudukan sendiri merupakan suatu area atau sudut yang dibuat di sekolah dengan tujuan khusus untuk memberikan informasi, edukasi, dan materi mengenai isu-isu kependudukan kepada siswa. Pojok ini dirancang untuk menjadi sumber belajar yang interaktif dan menarik, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman siswa terhadap aspek-aspek kependudukan. Pojok kependudukan dirancang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang aktif dan partisipatif mengenai isu-isu kependudukan. Melalui pendekatan ini, diharapkan siswa dapat lebih memahami dampak kependudukan dan memiliki pengetahuan yang lebih baik untuk mengambil keputusan yang cerdas terkait dengan kesehatan reproduksi dan pembangunan berkelanjutan. Elemen-elemen yang dapat dihadirkan di pojok kependudukan dalam sekolah siaga kependudukan (SSK) dapat mencakup:

- Gambar atau foto, poster, infografis, atau papan informasi yang memberikan gambaran umum tentang isu-isu kependudukan, seperti kesehatan reproduksi remaja, kelahiran sehat, kematian akibat langsung atau tidak langsung, pernikahan dini, pernikahan dewasa, pertumbuhan penduduk, migrasi atau mobilitas, daerah kumuh, korban tawuran, kemacetan lalu lintas, dsb.

- Grafik atau diagram yang menunjukkan isu-isu atau materi terkait pertumbuhan penduduk, persebaran penduduk, kepadatan penduduk, migrasi, usia kawin, angka ketergantungan, kesertaan KB, komposisi penduduk, AKI, AKB, dsb.
- Peta kependudukan yang berisikan materi terkait persebaran penduduk, pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, migrasi, usia kawin, tingkat kesertaan KB, kualitas penduduk, komposisi penduduk.
- Ornamen lainnya, seperti buku, brosur, majalah, *banner*, film kependudukan, lagu-lagu, cerita drama, alat sensus atau survei, *display* alkon, TV dan *sound system wireless, infocus, DVD player*, ruang PIK, etalase kaca, AC, tugas atau penelitian berbasis kependudukan, dsb.

## **2.8 Pokok-pokok Pelaksanaan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)**

### 1. Prinsip-prinsip dasar kegiatan:

- Sekolah siaga kependudukan (SSK) mengintegrasikan materi dalam mata pelajaran (tidak menambah jam pelajaran).
- Sekolah siaga kependudukan (SSK) dapat dijadikan wadah program BKKBN sebelumnya (misal PIK, dll) sehingga simultan dan berdampingan.
- Sekolah siaga kependudukan (SSK) bersifat gradual, meliputi beberapa bidang studi sesuai pokok bahasan mata pelajaran dan dapat berkembang.
- Sekolah siaga kependudukan (SSK) konsisten dalam mata pelajaran tersebut dan pokok bahasan yang berhubungan dengan kependudukan tetap ada dalam kurikulum.
- Sekolah siaga kependudukan (SSK) mengedepankan peran aktif murid untuk ikut serta dalam kegiatan terkait data kependudukan lingkungan sekitar.

### 2. Mekanisme operasional guru pengampu pelajaran:

- Menyusun RPP dan LKS.
  - Menjelaskan pada murid tentang kependudukan (sesuai mata pelajaran).
  - Membuat master instrumen untuk menggali data kependudukan yang dapat dikembangkan sesuai kearifan lokal.
  - Simulasi penggalan info pada masyarakat sekitar (minimal 2 orang responden).
  - Menjelaskan teknik analisis sederhana data kependudukan.
  - Aktif membimbing pojok kependudukan (diskusi dan konsultasi).
3. Mekanisme operasional peserta didik:
- Melakukan penggalan informasi kepada masyarakat di sekitarnya.
  - Melakukan analisis sederhana atas data kependudukan yang diperoleh.
  - Menyajikan hasil penggalan data dan analisis dalam tampilan yang menarik (tabel, diagram, dll).
  - Aktif mengikuti kegiatan di pojok kependudukan.

## 2.9 Indikator SSK Dasar dan SSK Paripurna

Sekolah yang mengikuti program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) harus memenuhi indikator keberhasilan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yang terbagi menjadi SSK Dasar dan SSK Paripurna.

Tabel 2.1 Indikator SSK Dasar dan SSK Paripurna

<b>INDIKATOR</b>	<b>SSK DASAR</b>	<b>SSK PARIPURNA</b>
SK SSK	Ada	Ada
Keikutsertaan dalam Sosialisasi	Ada	Ada
Orientasi Penyusunan RPP terintegrasi Materi	1-2 Guru yang mendapatkan	> 2 Guru yang mendapatkan

Kependudukan	orientasi	orientasi
Tersusunnya RPP	1-2 RPP	> 2 RPP
Koordinasi dan Penguatan SSK	1x Pertemuan membahas SSK	> 1x Pertemuan membahas SSK
Pojok Kependudukan	1 Materi pendidikan kependudukan di perpustakaan sekolah	Terdapat ruang tersendiri sesuai juklak pendidikan kependudukan
Kegiatan kesiswaan yang mengandung pendidikan kependudukan	Terdapat 1 kegiatan kesiswaan	> 1 Kegiatan kesiswaan

Sumber: [cis.bkkbn.go.id/dalduk/?p=20](http://cis.bkkbn.go.id/dalduk/?p=20)

## 2.10 Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

1. Menentukan tema kependudukan yang akan diintegrasikan dalam pelajaran.
2. Menentukan mata pelajaran yang akan diintegrasikan (sesuai dengan kondisi sekolah, kompetensi guru, serta tidak selalu dengan mata pelajaran IPS atau geografi).
3. Menentukan kompetensi dasar yang akan diintegrasikan.
4. Menyiapkan kelengkapan penyusunan RPP (materi, data, buku-buku, dll).
5. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

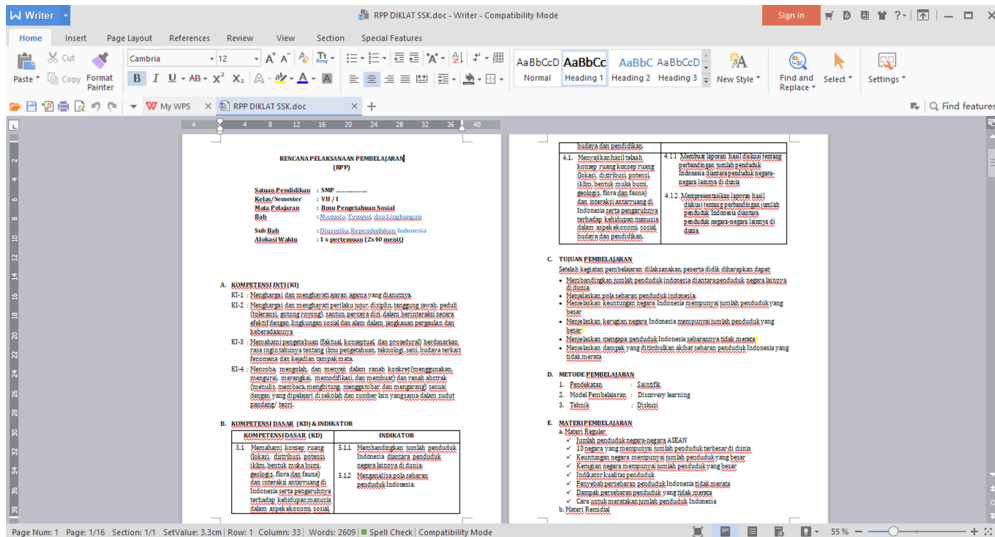
Berikut tema-tema materi kependudukan yang dapat diintegrasikan (SMP):

1. Membentuk karakter anak dan remaja.
2. Remaja dan perkembangannya.
3. Kependudukan.

4. Bonus demografi.
5. Urbanisasi.

Berikut tema-tema materi kependudukan yang dapat diintegrasikan (SMA):

1. Ledakan penduduk dan dampaknya dalam kehidupan.
2. Remaja dan permasalahannya.
3. Perubahan sosial dalam kependudukan.
4. Ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi.
5. Alat reproduksi manusia dan penyakit kelamin.
6. Keluarga berkualitas.



Gambar 2.1 Contoh RPP Kelas VII Mata Pelajaran IPS

Sumber: [cis.bkkbn.go.id/dalduq/?p=20](http://cis.bkkbn.go.id/dalduq/?p=20)

## 2.11 SMP Negeri 37 Surabaya

SMP Negeri 37 Surabaya adalah sebuah sekolah menengah pertama negeri yang terletak di Surabaya. SMP Negeri 37 Surabaya berlokasi di Jl. Kalianyar No. 18-20, Kapasari, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60273. Visi dan misi dari SMP Negeri 37 Surabaya adalah unggul dalam mutu berdasarkan imtaq, IPTEK, yang berwawasan lingkungan. SMP Negeri 37 Surabaya telah meraih penghargaan Sekolah Adiwiyata

Mandiri. Kebijakan yang diterapkan di sekolah berbasis lingkungan, kegiatan lingkungan berbasis partisipatif (melibatkan seluruh warga sekolah utamanya para siswa), pembelajaran tentang lingkungan hidup (kurikulum berbasis lingkungan), serta tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan. SMP Negeri 37 Surabaya telah menerapkan kurikulum yang sesuai standar pendidikan nasional. SMP Negeri 37 Surabaya dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendidikan, seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, lapangan olahraga, dan lainnya. Sekolah ini menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler bagi siswa, seperti olahraga, seni, dan bahasa. SMP Negeri 37 Surabaya telah menjadi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di Kota Surabaya dan termasuk dalam SSK Paripurna karena telah memenuhi indikator keberhasilan SSK Paripurna.



### BAB III METODE PELAKSANAAN

#### 3.1 Lokasi MBKM *by Design* FKM UNAIR

Kegiatan MBKM *by Design* FKM UNAIR dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Pemerintah Kota Surabaya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) berlokasi di Jalan Kedungsari No. 18, Wonorejo, Tegalsari, Kedunggoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60263, Telp. (031) 5346317.

#### 3.2 Waktu Pelaksanaan MBKM *by Design* FKM UNAIR

Rangkaian pelaksanaan kegiatan MBKM *by Design* FKM UNAIR dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober - 22 Desember 2023.

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan MBKM *by Design* FKM UNAIR

Rangkaian Kegiatan MBKM <i>by Design</i> FKM UNAIR	Oktober Minggu Ke-1 & 2	Oktober Minggu Ke-3 & 4	November Minggu Ke-1 & 2	November Minggu Ke-3 & 4	Desember Minggu Ke-1 & 2	Desember Minggu Ke-3 & 4
Pembekalan magang						
Kegiatan MBKM -Observasi -Koordinasi -Pendampingan -Penyusunan laporan						

Seminar hasil laporan akhir MBKM							
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

### 3.3 Metode Pelaksanaan MBKM *by Design* FKM UNAIR

Metode pelaksanaan kegiatan magang yang digunakan di DP3APPKB adalah sebagai berikut:

1. Ceramah dan Tanya Jawab: Pengarahan pemberian informasi, dan penjelasan dari pembimbing lapangan serta pejabat instansi guna memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai tempat magang.
2. Observasi: Pengamatan secara langsung mengenai berbagai kegiatan di DP3APPKB Kota Surabaya.
3. Partisipasi: Dilaksanakan dengan mengikuti atau terlibat secara langsung dan berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan MBKM di DP3APPKB serta melakukan analisis.
4. Studi Literatur: Dilakukan untuk memperoleh teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan selama kegiatan magang berlangsung. Kegiatan ini juga dilakukan untuk mencoba menyesuaikan teori dengan aplikasi yang terjadi di lapangan tempat magang.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi: Melakukan pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan suatu kegiatan. Pengamatan dilakukan pada setiap pelaksanaan kegiatan MBKM *by Design* FKM UNAIR di DP3APPKB, seperti dilakukannya observasi pada pelaksanaan kegiatan *assessment*, advokasi, sosialisasi, dan pendampingan SSK yang diikuti oleh mahasiswa peserta MBKM *by design* FKM UNAIR.
2. Studi Literatur: Dilaksanakan untuk memperoleh teori yang berkaitan

dengan permasalahan yang ditemukan selama proses magang berlangsung, serta mencoba untuk menyesuaikan teori dengan kenyataan yang terjadi di lokasi magang.

3. Wawancara: Mengumpulkan data dengan mendapatkan keterangan atau penjelasan secara lisan dari responden atau saat melakukan percakapan. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait, seperti pada pelaksanaan kegiatan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) yaitu, Kepala Sekolah, guru, siswa, maupun petugas atau karyawan di sekolah sasaran SSK.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Surabaya**

DP3APPKB adalah dinas yang berada di bawah naungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta bekerja di bawah naungan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional). DP3APPKB merupakan singkatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya berlokasi di Jalan Kedungsari No. 18, Wonorejo, Tegalsari, Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60263. Visi dari DP3APPKB Kota Surabaya adalah terwujudnya keluarga yang berkualitas dan berdaya dengan dukungan lembaga berbasis masyarakat. Sedangkan, misi dari DP3APPKB Kota Surabaya yaitu:

- Meningkatkan pemberdayaan perempuan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- Meningkatkan kualitas pelayanan KB serta pembinaan ketahanan keluarga.
- Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dan pemberdayaan masyarakat.

Tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya adalah untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Pelaksana pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- Pelaksanaan Administrasi Dinas sesuai lingkup tugasnya.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **4.2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Surabaya**

Menurut Peraturan Walikota Nomor 77 tahun 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana terdiri atas:

1. Sekretariat: Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat membawahi sub bagian:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan
2. Bidang Pemberdayaan Perempuan: Bidang pemberdayaan perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pemberdayaan perempuan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang pemberdayaan perempuan terdiri atas:
- Seksi Pembinaan Pemberdayaan Perempuan
  - Seksi Pengarusutamaan Gender dan Peran Aktif Perempuan
3. Bidang Kesejahteraan Keluarga: Bidang kesejahteraan keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang kesejahteraan keluarga yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang kesejahteraan keluarga terdiri atas:
- Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
  - Seksi Ketahanan Keluarga
4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana: Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan

koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana terdiri atas:

- Seksi Keluarga Berencana
- Seksi Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)

5. Bidang Pengarusutamaan Hak Anak, Perlindungan Perempuan dan Anak: Bidang pengarusutamaan hak anak, perlindungan perempuan dan anak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengarusutamaan hak anak, perlindungan perempuan dan anak yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bidang pengarusutamaan hak anak, perlindungan perempuan dan anak terdiri atas:

- Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak
- Seksi Pengarusutamaan Hak Anak

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD): Pada dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pembentukan dan susunan organisasi UPTD diatur dalam Peraturan Walikota.
7. Kelompok Jabatan Fungsional: Walikota berwenang untuk menetapkan kelompok jabatan fungsional pada dinas. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional keahlian dan

jabatan fungsional keterampilan. Jenis, jenjang, dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Walikota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Gambar 4.1 Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya

Sumber: [dp3appkb.surabaya.go.id/](http://dp3appkb.surabaya.go.id/)

#### 4.3 Pembelajaran Pencapaian *Learning Outcome* Mata Kuliah

##### 4.3.1 Mata Kuliah Aplikasi Komputer Analisis Kependudukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) berperan dalam mendukung implementasi program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di tingkat sekolah. Pada pendidikan kependudukan melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di Kota Surabaya, terdapat aspek yang berkaitan dengan pengaplikasian komputer analisis kependudukan yaitu mahasiswa



peserta magang MBKM *by Design* FKM UNAIR dapat mengaplikasikan cara penggunaan alat dan teknik komputer untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memvisualisasikan data kependudukan guna mendukung pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan dan program kependudukan. Selain itu, mahasiswa dapat mengembangkan keterampilan analisis data yang relevan dengan isu-isu kependudukan melalui tugas pembantuan secara langsung di lapangan seperti tugas input data kependudukan di berbagai aplikasi atau *website* kependudukan yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya.

#### **4.3.2 Mata Kuliah Komunikasi Pemasaran Kesehatan Terintegrasi**

Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah program yang melibatkan sekolah-sekolah dalam memberikan edukasi kepada siswa mengenai isu-isu kependudukan. Dalam konteks ini, komunikasi pemasaran kesehatan terintegrasi menjadi bagian dari upaya sekolah untuk menyampaikan pesan-pesan penting mengenai kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan perlindungan anak kepada siswa. Mahasiswa peserta magang MBKM *by Design* FKM UNAIR dapat memberikan kontribusi dalam merancang kampanye komunikasi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai isu-isu kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Mata kuliah komunikasi pemasaran kesehatan terintegrasi dapat mendukung program DP3APPKB dalam mengembangkan kampanye komunikasi yang efektif dan dapat diukur keberhasilannya guna meningkatkan pemahaman dan perilaku masyarakat terkait kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga.

#### **4.3.3 Mata Kuliah Manajemen Risiko K3**

Pada pendidikan kependudukan melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di Kota Surabaya, terdapat aspek yang berkaitan dengan manajemen risiko K3, dalam konteks ini, DP3APPKB dapat

mempromosikan kesadaran mengenai kesehatan reproduksi dan keselamatan kerja di tempat kerja, khususnya dalam hal perlindungan anak dan keluarga berencana. Selain itu, DP3APPKB dapat memasukkan elemen manajemen risiko dalam konteks kependudukan ke dalam program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), seperti menyajikan informasi mengenai risiko kesehatan reproduksi dan langkah-langkah pencegahannya. Mahasiswa peserta magang MBKM *by Design* FKM UNAIR dapat memberikan kontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kependudukan dengan memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan masyarakat.

#### **4.3.4 Mata Kuliah Metodologi Penelitian**

Pada pendidikan kependudukan melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di Kota Surabaya, terdapat aspek yang berkaitan dengan metodologi penelitian, dalam konteks ini, penerapan metode penelitian dapat digunakan untuk mengumpulkan data terkait profil siswa, pengetahuan mereka mengenai kependudukan, dan dampak dari program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). Data dan informasi yang berkualitas dapat digunakan untuk merancang program yang berbasis bukti dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, mengukur efektivitas program, melakukan perbaikan berkelanjutan, dan pengembangan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana.

#### **4.3.5 Mata Kuliah Sistem Informasi Geografi**

Pada pendidikan kependudukan melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di Kota Surabaya, terdapat aspek yang berkaitan dengan sistem informasi geografi, dalam konteks ini, sistem informasi geografi (SIG) dapat digunakan untuk memetakan distribusi penduduk, analisis data kependudukan, dan identifikasi masalah kependudukan di wilayah tertentu. Data ini dapat membantu sekolah dan masyarakat untuk memahami masalah kependudukan dan mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasinya. Dengan menggunakan teknologi SIG, data

kependudukan dapat diolah dan dianalisis dengan lebih efektif untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana.

#### **4.3.6 Mata Kuliah Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Pada pendidikan kependudukan melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di Kota Surabaya, terdapat aspek yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, dalam konteks ini, DP3APPKB dapat mempromosikan kesadaran mengenai pentingnya perlindungan anak dan keluarga berencana yang sejalan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Mahasiswa peserta magang MBKM *by Design* FKM UNAIR dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk mendukung program perlindungan anak, keluarga berencana, dan keberlanjutan populasi.

#### **4.3.7 Mata Kuliah Penilaian Kritis Kesehatan Reproduksi dan KIA**

Pada pendidikan kependudukan melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di Kota Surabaya, terdapat aspek yang berkaitan dengan penilaian kritis kesehatan reproduksi dan KIA, dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) melalui program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dapat mempromosikan kesadaran mengenai pentingnya kesehatan reproduksi dan keluarga berencana untuk membantu siswa-siswi dalam membuat keputusan yang tepat terkait dengan kesehatan reproduksi mereka. Secara keseluruhan, DP3APPKB melalui program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan mata kuliah penilaian kritis kesehatan reproduksi dan KIA memiliki peran yang saling terkait dalam upaya mendorong kesehatan reproduksi, keluarga berencana, dan perlindungan anak.

#### **4.3.8 Mata Kuliah Seks, Gender, dan Seksualitas**

Pada pendidikan kependudukan melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di Kota Surabaya, terdapat aspek yang berkaitan dengan seks, gender, dan seksualitas, dalam konteks ini, Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) memasukkan materi mengenai seks, gender, dan seksualitas dalam kurikulumnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sehat dan inklusif kepada siswa mengenai isu-isu terkait, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang bijaksana terkait dengan kesehatan reproduksi dan kehidupan pribadi mereka. Mata kuliah seks, gender, dan seksualitas membahas mengenai peran penting seks, gender, dan seksualitas dalam kehidupan manusia. Keterkaitan DP3APPKB melalui program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dengan mata kuliah seks, gender, dan seksualitas dapat memberikan pengetahuan yang mendalam mengenai aspek-aspek seksualitas dan gender yang relevan dalam konteks perlindungan anak dan keluarga berencana.

#### **4.3.9 Mata Kuliah Teknik Pengukuran Fertilitas, KB, dan Mortalitas**

Pada pendidikan kependudukan melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di Kota Surabaya, terdapat aspek yang berkaitan dengan teknik pengukuran fertilitas, KB, dan mortalitas, dalam konteks ini, penggunaan teknik pengukuran fertilitas, keluarga berencana, dan mortalitas untuk memantau dan mengelola program-program DP3APPKB. Melalui pengukuran yang akurat, DP3APPKB dapat mengevaluasi efektivitas program keluarga berencana dalam mengontrol fertilitas dan mengurangi angka kematian pada ibu dan anak.

#### **4.4 Implementasi Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 37 Surabaya**

SMP Negeri 37 Surabaya merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang terletak di daerah perkotaan yang padat penduduk. SMP Negeri 37 Surabaya berlokasi di Jl. Kalianyar No. 18-20, Kapasari,

Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60273. Sekolah ini memiliki peran yang penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki pemahaman yang baik terkait isu-isu kependudukan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh SMP Negeri 37 Surabaya adalah melibatkan diri dalam program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).

Sekolah siaga kependudukan (SSK) merupakan sekolah yang mengintegrasikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran atau muatan lokal khusus kependudukan di mana di dalamnya terdapat pojok kependudukan (*population corner*) sebagai salah satu sumber belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan Generasi Berencana (GenRe). Sekolah siaga kependudukan (SSK) bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, terutama pelajar, terkait isu-isu kependudukan dan pembangunan keluarga.

SMP Negeri 37 Surabaya merupakan salah satu sekolah yang telah membentuk dan aktif dalam mengimplementasikan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK). SMP Negeri 37 Surabaya telah mengintegrasikan materi-materi tentang kependudukan ke dalam kurikulum mereka, hal ini terbukti pada lembar rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Jawa, Informatika, inklusi, IPA, IPS, matematika, PAI, PAKr, prakarya, seni budaya, dan BK. Selain itu, SMP Negeri 37 Surabaya juga menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang telah mengintegrasikan materi kependudukan di dalamnya. Terdapat beberapa ekstrakurikuler yang terintegrasi dengan materi kependudukan, yaitu pencak silat, OSN IPA, OSN IPS, dan PMR. Secara administratif SMP Negeri 37 Surabaya telah terdaftar sebagai Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), SMP Negeri 37 Surabaya telah membentuk SK SSK oleh Kepala Sekolah, mengisi lembar kesediaan sekolah untuk mengikuti program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK),

serta telah membentuk pengurus SSK di SMP Negeri 37 Surabaya. Selain itu, sudah terdapat pojok kependudukan di SMP Negeri 37 Surabaya yang tersusun dari majalah dinding serta buku-buku yang memberikan informasi seputar materi kependudukan.

Melalui partisipasi dalam program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), SMP Negeri 37 Surabaya telah berhasil menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pemahaman siswa terkait isu-isu kependudukan. Para siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoritis, tetapi juga memiliki kesempatan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam situasi dunia nyata. Dampak dari program ini sangat signifikan. Para siswa menjadi lebih sadar akan pentingnya keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Mereka juga menjadi lebih peka terhadap isu-isu kependudukan seperti pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan dan dampaknya terhadap lingkungan dan kualitas hidup manusia. Selain itu, para siswa juga menjadi agen perubahan di masyarakat mereka sendiri, dengan berbagi pengetahuan dan kesadaran yang mereka dapatkan kepada keluarga, teman-teman, dan lingkungan sekitar.

#### **4.5 Indikator Keberhasilan SSK Paripurna yang Tercapai di SMP Negeri 37 Surabaya**

SMP Negeri 37 Surabaya telah menjadi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di Kota Surabaya dan termasuk dalam SSK Paripurna karena telah memenuhi indikator keberhasilan SSK Paripurna.

Tabel 4.1 Indikator Keberhasilan SSK Paripurna SMP Negeri 37 Surabaya

1. SK SSK Kepala Sekolah	✓
2. Pojok kependudukan	✓

3. Keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi SSK	✓
4. Orientasi penyusunan RPP terintegrasi materi kependudukan	✓
5. Tersusunnya kurikulum materi kependudukan dalam pembelajaran di kelas (RPP)	✓
6. Integrasi materi kependudukan dengan kegiatan ekstrakurikuler atau kesiswaan	✓
7. Papan nama SSK	✓
8. PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja)	✓
9. Kesiediaan sekolah mengikuti kegiatan SSK	✓

Sumber: Hasil *assessment* SSK di SMP Negeri 37 Surabaya

#### 4.6 Kendala Pelaksanaan MBKM *by Design* FKM UNAIR

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan MBKM *by Design* FKM UNAIR di DP3APPKB, yaitu lebih ke aspek administratif dan perizinan, terkadang surat tugas untuk turun ke lapangan, dalam konteks SSK, yaitu sekolah-sekolah yang menjadi sasaran *assessment* Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) belum tersedia atau masih dalam proses pembuatan. Selain itu, kendala terkait program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di Kota Surabaya pada umumnya, yaitu terkendala pada kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pendidikan kependudukan bagi sekolah dan siswa, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program ini, tidak jarang juga beberapa sekolah terkendala pada ketersediaan ruangan untuk penempatan pojok kependudukan di sekolah, kurangnya pemahaman terkait kurikulum pendidikan kependudukan dan pembentukan RPP untuk mengintegrasikan pendidikan kependudukan ke

dalam kurikulum yang sudah ada, beberapa sekolah juga meminta adanya pendampingan lebih secara rutin kepada pihak dinas terkait untuk keberlanjutan program SSK di sekolah setelah pelaksanaan sosialisasi SSK, serta kendala pada kurangnya koordinasi antar berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan program ini.

SMP Negeri 37 Surabaya sendiri telah termasuk dalam SSK Paripurna, sebagian besar indikator keberhasilan SSK Paripurna telah tercapai, sehingga tidak banyak kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMP Negeri 37 Surabaya. SMP Negeri 37 Surabaya memberi masukan yaitu jika nantinya sekolah membutuhkan bantuan dalam mengimplementasikan program SSK di sekolah, diharapkan pihak DP3APPKB dapat menjadi narasumber bagi sekolah untuk pelatihan atau seminar.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Kegiatan MBKM *by Design* FKM UNAIR terdiri atas pembekalan, penyampaian materi, pendampingan terkait program SSK dan Elsimil, *pre-test* dan *post-test*, pelaksanaan *assessment* SSK, pelaporan dan evaluasi hasil *assessment* SSK, penyusunan rencana tindak lanjut (RTL), dan pelaksanaan kegiatan RTL SSK meliputi advokasi, sosialisasi dan pelatihan, serta pendampingan SSK.
2. Kegiatan MBKM *by Design* FKM UNAIR yang dilaksanakan di DP3APPKB dapat diimplementasikan sesuai dengan materi perkuliahan di antaranya: aplikasi komputer kependudukan, komunikasi pemasaran kesehatan terintegrasi, manajemen risiko K3, metodologi penelitian, sistem informasi geografi, pengelolaan lingkungan hidup, penilaian kritis kesehatan reproduksi dan KIA, seks, gender, dan seksualitas, serta mata kuliah teknik pengukuran fertilitas, KB, dan mortalitas.
3. Implementasi program Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMP Negeri 37 Surabaya telah berjalan dengan baik. SMP Negeri 37 Surabaya telah melaksanakan SSK, memenuhi indikator keberhasilan SSK, dan mendapatkan gelar Sekolah Siaga Kependudukan “Paripurna”. Hal tersebut diukur dengan telah disahkannya SK SSK dari Kepala Sekolah, tersedianya pojok kependudukan dan papan nama SSK, terbentuknya RPP yang telah terintegrasi dengan pendidikan kependudukan meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Jawa, Informatika, inklusi, IPA, IPS, matematika, PAI, PAKr, prakarya, seni budaya, dan BK.

#### **5.2 Saran**

Diharapkan pihak DP3APPKB dapat melakukan penjadwalan

sosialisasi atau pendampingan terstruktur sebagai upaya dalam mengembangkan pendidikan kependudukan di sekolah-sekolah sasaran SSK di Kota Surabaya, sehingga program yang sudah dijalankan dapat berkelanjutan. Selain itu, diharapkan program SSK dapat menjadi kebijakan yang wajib diimplementasikan oleh sekolah-sekolah di Kota Surabaya sehingga jangkauan SSK di Kota Surabaya dapat menyeluruh.

## DAFTAR PUSTAKA









- BKKBN, 2016. Direktorat Kerjasama Pendidikan Kependudukan. [Online] Available at: <https://cis.bkkbn.go.id/dalduk/?p=20>. [Accessed 5 December 2023].
- Damayanti, E. T., 2022. Preferensi Mahasiswa Pengikut Kampus Merdeka: (Studi Pilihan Rasional Mahasiswa yang Mengikuti Program Kampus Merdeka).
- DP3APPKB Surabaya. [Online] Available at: <https://dp3appkb.surabaya.go.id/>. [Accessed 5 December 2023].
- Gunarsa, I K. G. R., 2022. Persepsi Mahasiswa Terhadap Kebijakan MBKM, Relevansi Kurikulum, Kesiapan Prodi Akuntansi UNAIR dan Minat Mengikuti Program MBKM.
- Septiani, E., Setyowati, D.L. & Atmaja, H.T., 2022. Pengembangan EduKependudukan Digital di Sekolah Siaga Kependudukan Untuk Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs). *JINoP (Jurnal Inovasi Pembelajaran)*, 8(2), pp.156–170.
- SMP Negeri 37 Surabaya. <https://smpn37sby.sch.id/>. [Online] Available at: <https://smpn37sby.sch.id/>. [Accessed 5 December 2023].

## LAMPIRAN















*Lampiran I. Logbook MBKM by Design FKM UNAIR***LOGBOOK MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

TAHUN 2023

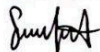

















Nama : Sabrina Salsa Anggita Panjaitan  
 NIM : 102011133189  
 Instansi / Mitra : DP3APPKB  
 Pembimbing Akademik : Dr. Lutfi Agus Salim, S.KM., M.Si.  
 Pembimbing Lapangan : Rio Darmawan Jaya, S.H.

No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD Mahasiswa
<b>Minggu Ke-1</b>			
1.	Senin, 02 Oktober	Pembekalan mahasiswa magang terkait program pengendalian penduduk, pemberian materi terkait DP3APPKB, dan materi terkait stunting	
2.	Selasa, 03 Oktober	1. Pemberian materi terkait Verval (Verifikasi Validasi), TPK (Mekanisme Tim Pendamping Keluarga), dan Elsimil (Elektronik Siap Nikah & Hamil) 2. Pembagian kelompok dan wilayah untuk kegiatan MBKM 3. Pembagian tugas entry pelaporan data Elsimil	
3.	Rabu, 04 Oktober	Proses entry data Elsimil	
4.	Kamis, 05 Oktober	Melanjutkan proses entry data Elsimil	
5.	Jumat, 06 Oktober	Melanjutkan proses entry data Elsimil	
<b>Minggu Ke-2</b>			
6.	Senin, 09 Oktober	1. Mengerjakan pre-test dari pembimbing lapangan MBKM - DP3APPKB 2. Melanjutkan proses entry data Elsimil 3. Presentasi pra proposal skripsi	
7.	Selasa, 10 Oktober	1. Evaluasi pengerjaan pre-test 2. Evaluasi entry data Elsimil 3. Pemberian materi terkait SSK 4. Pemberian materi terkait SiPerindu 5. Pembagian dan pengaturan jadwal assessment SSK (Sekolah Siaga Kependudukan)	
8.	Rabu, 11 Oktober	1. Koordinasi MBKM bersama Dr. Lutfi Agus Salim S.KM., M.Si. 2. Pembagian tugas dari instansi Kesra terkait survei 'Kepedulian Remaja dalam	



No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD Mahasiswa
		Pencegahan Stunting' 3. Membuat instrumen dan isi dari kuesioner 'Kepedulian Remaja dalam Pencegahan Stunting'	
9.	Kamis, 12 Oktober	Mengikuti kegiatan Forum Konsultasi Publik Kebijakan dan Strategi Daerah Kota Surabaya 2021-2026 di BAPPEKO Surabaya	
10.	Jumat, 13 Oktober	Melanjutkan proses <i>entry</i> data Elsimil	
<b>Minggu Ke-3</b>			
11.	Senin, 16 Oktober	Diskusi tinjauan pustaka dan pembagian tugas penyelesaian tinjauan pustaka laporan stunting, laporan kemiskinan, dan draft kajian lansia	
12.	Selasa, 17 Oktober	Kunjungan ke Dinas Sosial Surabaya dan diskusi terkait keadaan PMKS dan kemiskinan	
13.	Rabu, 18 Oktober	Pembuatan google forms untuk keperluan survei stunting remaja di Kota Surabaya	
14.	Kamis, 19 Oktober	Pelaksanaan survei stunting remaja di Kota Surabaya	
15.	Jumat, 20 Oktober	Pelaksanaan survei stunting remaja di Kota Surabaya	
<b>Minggu Ke-4</b>			
16.	Senin, 23 Oktober	Pelaksanaan assessment Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMP Kristen Logos, SMP Muhammadiyah 2 Surabaya, dan SMP Tri Guna Bhakti Surabaya	
17.	Selasa, 24 Oktober	Pelaksanaan assessment Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMP PGRI 29 Surabaya, SMP Negeri 41 Surabaya, SMP Negeri 8 Surabaya, SMP Terbuka 8 Surabaya, SMP Negeri 44 Surabaya, dan MTS Taswirul Afkar	
18.	Rabu, 25 Oktober	Pelaksanaan assessment Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMA Muhammadiyah 1 Surabaya	
19.	Kamis, 26 Oktober	Pelaksanaan assessment Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMP Negeri 27 Surabaya	
20.	Jumat, 27 Oktober	Pelaksanaan assessment Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di MTS Muhammadiyah 19	
<b>Minggu Ke-5</b>			
21.	Senin, 30 Oktober	Pelaksanaan assessment Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMP Negeri 18 Surabaya	
22.	Selasa, 31 Oktober	Pelaksanaan assessment Sekolah Siaga	



No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD Mahasiswa
		Kependudukan (SSK) di MTS Makarimul Akhlaq	
23.	Rabu, 01 November	Rekap laporan <i>assessment</i> SSK ke dalam <i>spreadsheet</i>	
24.	Kamis, 02 November	Membuat PPT laporan hasil <i>assessment</i> SSK dan diskusi terkait kendala yang terjadi di lapangan	
25.	Jumat, 03 November	Melanjutkan diskusi terkait kendala yang terjadi di lapangan serta membahas terkait rencana tindak lanjut (RTL)	
<b>Minggu Ke-6</b>			
26.	Senin, 06 November	Penyusunan laporan dan RTL pelaksanaan <i>assessment</i> SSK	
27.	Selasa, 07 November	Presentasi dan evaluasi hasil <i>assessment</i> SSK dan RTL	
28.	Rabu, 08 November	Supervisi dengan Dr. Lutfi Agus Salim S.KM., M.Si. dan Bapak Arif	
29.	Kamis, 09 November	Konsultasi RTL bersama mentor pembimbing lapangan DP3APPKB	
30.	Jumat, 10 November	Mentoring pembuatan proposal bersama mentor pembimbing lapangan DP3APPKB	
<b>Minggu Ke-7</b>			
31.	Senin, 13 November	Survei kepuasan pelanggan RS Sosodoro Djatikoosumo Bojonegoro	
32.	Selasa, 14 November	Supervisi bersama Ibu Lina, Ibu Nunik, Bapak Hari, dan Dr. Lutfi Agus Salim S.KM., M.Si.	
33.	Rabu, 15 November	Pembagian dan input data aplikasi Sayang Warga Surabaya	
34.	Kamis, 16 November	Pembagian dan input data aplikasi Sayang Warga Surabaya	
35.	Jumat, 17 November	Pembagian dan input data aplikasi Sayang Warga Surabaya	
<b>Minggu Ke-8</b>			
36.	Senin, 20 November	1. Diskusi koordinasi persiapan advokasi dan sosialisasi SSK 2. Supervisi bersama Ibu Mahmudah dan Ibu Nunik	
37.	Selasa, 21 November	Diskusi koordinasi persiapan advokasi dan sosialisasi SSK	
38.	Rabu, 22 November	Pelaksanaan Advokasi di SMP Islam Surabaya dan SMP Muhammadiyah 2 Surabaya	
39.	Kamis, 23 November	Pelaksanaan Advokasi di Pondok Pesantren Al Fithrah dan SMAN 19 Surabaya	
40.	Jumat, 24 November	Pelaksanaan Advokasi di SMP PGRI 8 Surabaya	



No.	Tanggal	Jenis Kegiatan	TTD Mahasiswa
<b>Minggu Ke-9</b>			
41.	Senin, 27 November	Sosialisasi dan pelatihan Surabaya siap menjadi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di Gedung Pemerintah Kota Surabaya	
42.	Selasa, 28 November	Evaluasi pasca kegiatan sosialisasi dan pelatihan	
43.	Rabu, 29 November	Supervisi bersama Ibu Fitri dan ttd SPJ	
44.	Kamis, 30 November	Kunjungan ke SMP Negeri 37 Surabaya untuk pengambilan data laporan magang	
45.	Jumat, 01 Desember	Admin Elsimil dalam sosialisasi calon pengantin di Siola	
<b>Minggu Ke-10</b>			
46.	Senin, 04 Desember	Diskusi laporan akhir magang dan pendampingan	
47.	Selasa, 05 Desember	Pengerjaan laporan akhir magang	
48.	Rabu, 06 Desember	Pengerjaan laporan akhir magang	
49.	Kamis, 07 Desember	Pengerjaan laporan akhir magang	
50.	Jumat, 08 Desember	Seminar hasil laporan akhir magang MBKM by design FKM UNAIR	
<b>Minggu Ke-11</b>			
51.	Senin, 11 Desember	Pengerjaan revisi laporan akhir magang	
52.	Selasa, 12 Desember	Evaluasi rencana tindak lanjut dari program sosialisasi SSK dan penyampaian pesan kesan selama magang di DP3APPKB Kota Surabaya	
53.	Rabu, 13 Desember	Pengerjaan revisi laporan akhir magang	
54.	Kamis, 14 Desember	Pengerjaan revisi laporan akhir magang	
55.	Jumat, 15 Desember	Pengerjaan revisi laporan akhir magang	
<b>Minggu Ke-12</b>			
56.	Senin, 18 Desember	Pengerjaan revisi laporan akhir magang	
57.	Selasa, 19 Desember	Pengerjaan revisi laporan akhir magang	
58.	Rabu, 20 Desember	Pengerjaan revisi laporan akhir magang	
59.	Kamis, 21 Desember	Perpisahan Magang di DP3APPKB	
60.	Jumat, 22 Desember	Perpisahan Magang di DP3APPKB	

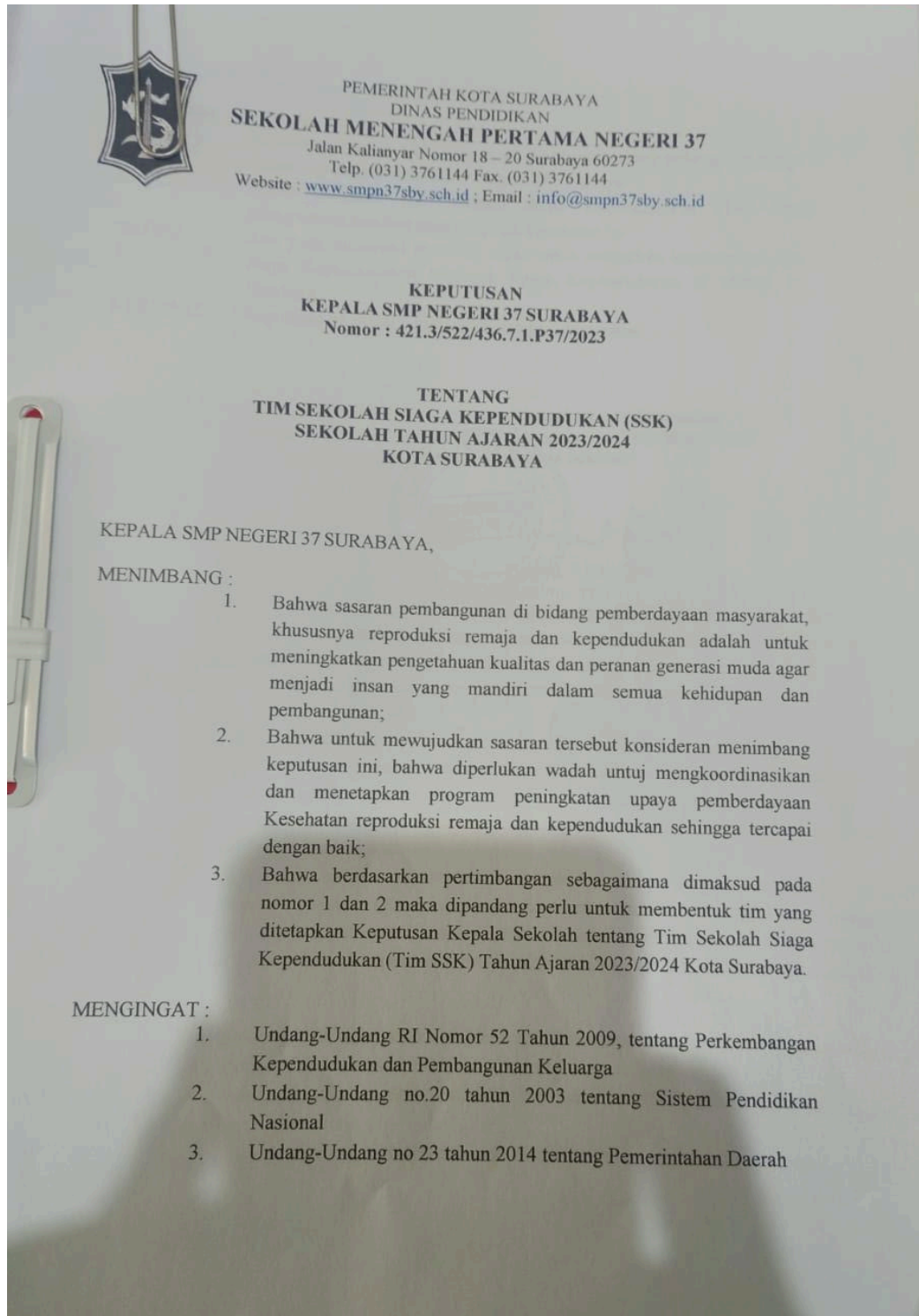
Pembimbingan Lapangan,

Rio Darmawan Jaya, S.H.

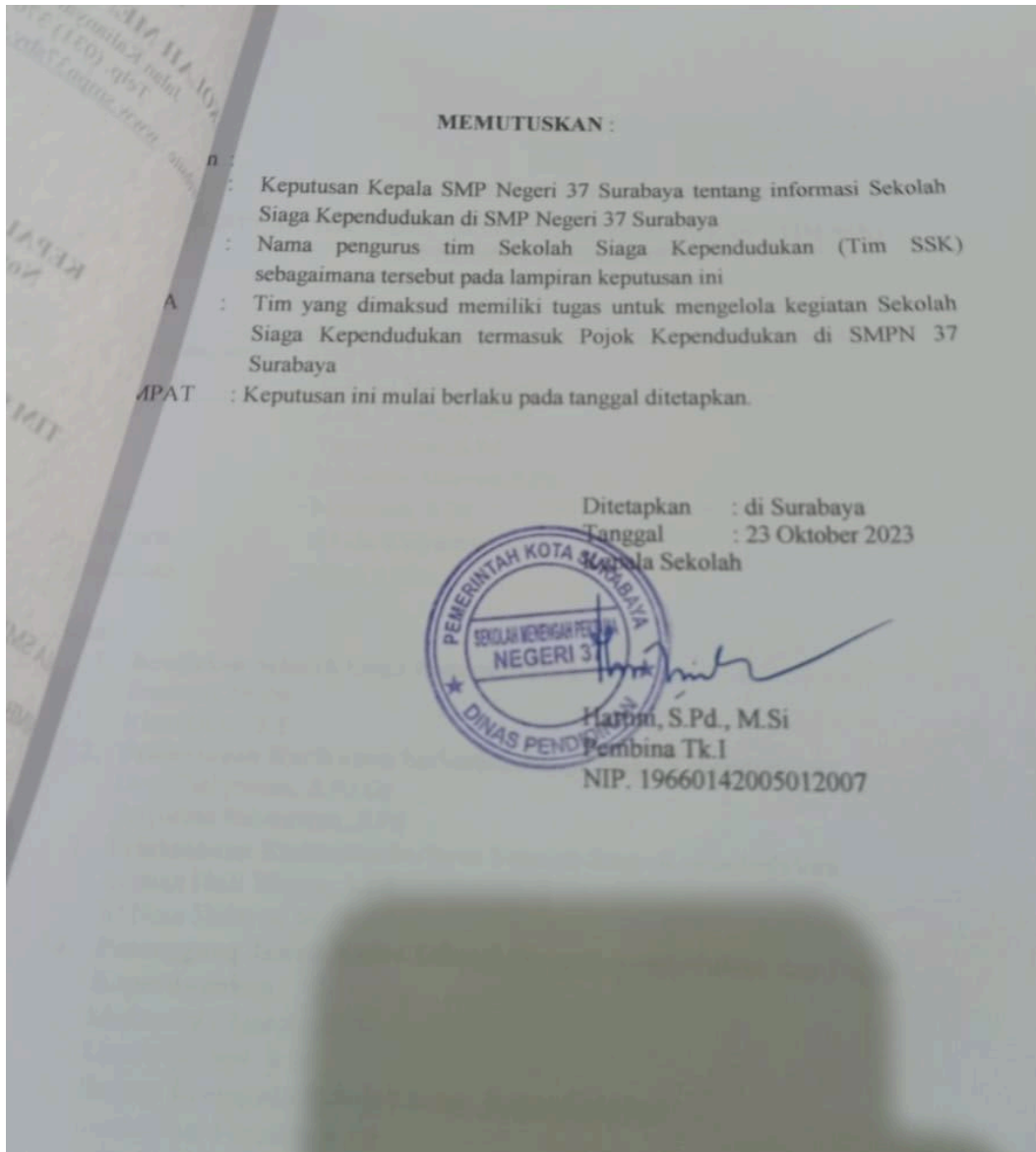
Pembimbing Akademik,

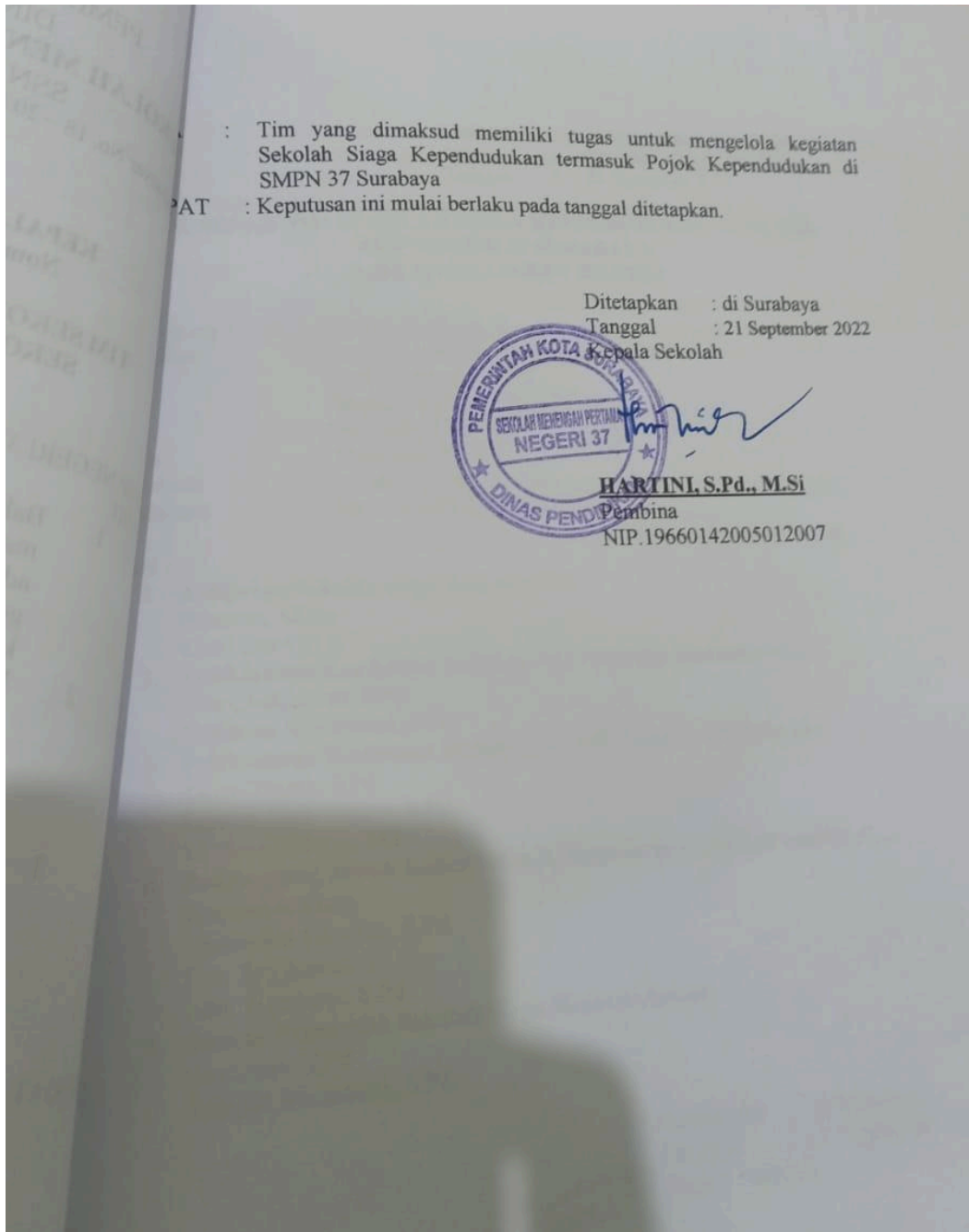
Dr. Lutfi Agus Sahim S.K.M., M.Si.  
NIP. 197008201997021001

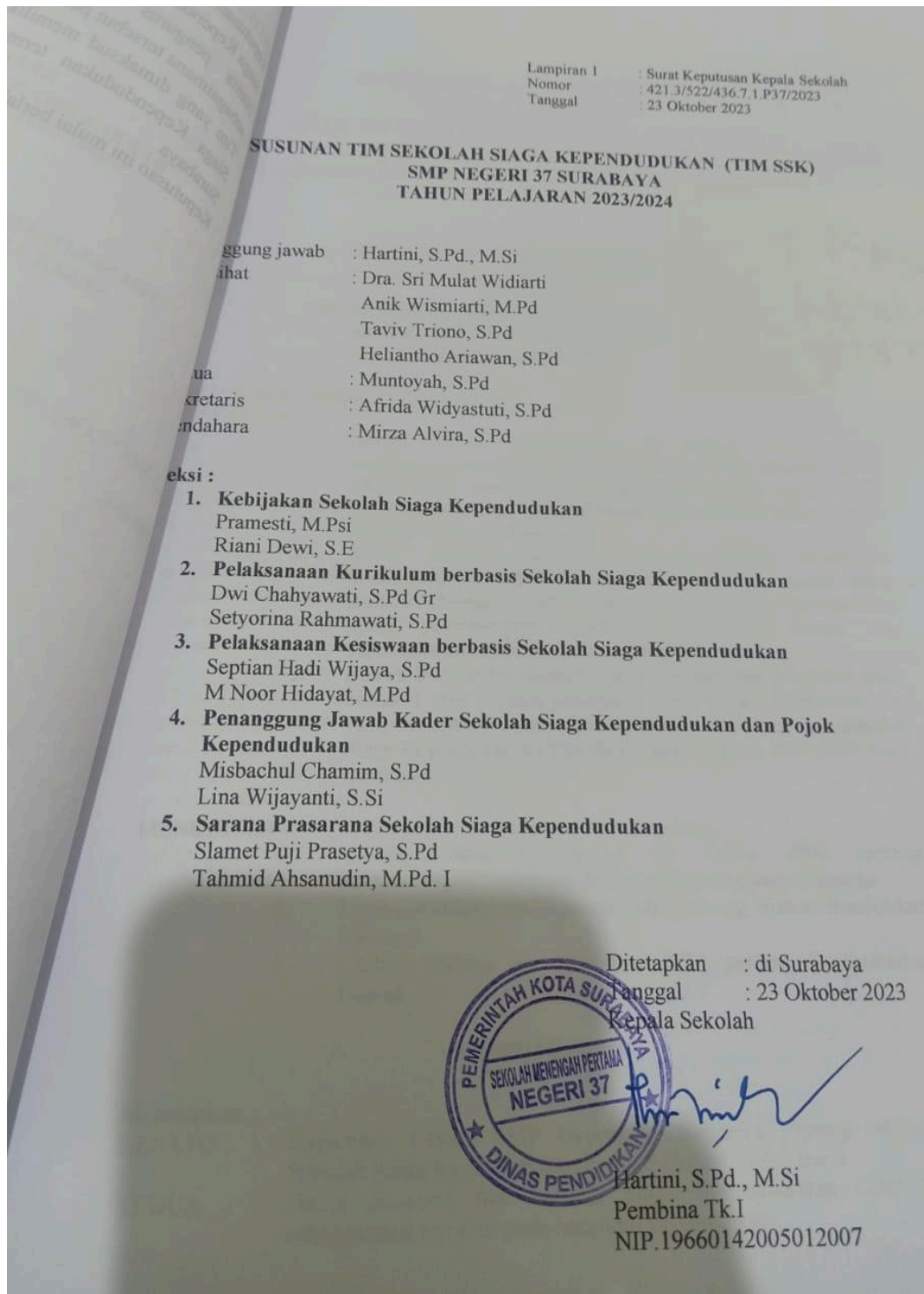
**Lampiran II. SK SSK Kepala Sekolah SMP Negeri 37 Surabaya**







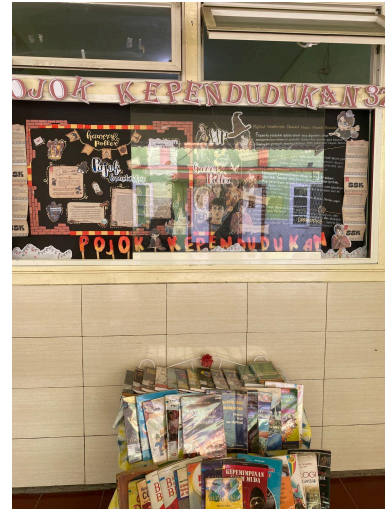




*Lampiran III. Dokumentasi Magang*



Papan Nama SSK SMP Negeri 37 Surabaya



Pojok Kependudukan SSK SMP Negeri 37 Surabaya



Kegiatan *Assesment* SSK di SMP Negeri 37 Surabaya



Dokumen SK SSK dan RPP

*LAMPIRAN IV. Sertifikat MBKM by Design FKM UNAIR Tahun 2023*

